

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dalam memperjuangkan hak-hak warga Kampung Bayam yang terdampak penggusuran akibat pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) tahun 2023, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses advokasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak JRMK, warga Kampung Bayam, dan pendamping teknis, serta penelusuran data sekunder dari berbagai sumber online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi JRMK meliputi advokasi politik melalui jalur litigasi dan non-litigasi, aksi demonstrasi, kampanye publik, serta lobi dan negosiasi dengan pemerintah. Meskipun strategi ini berhasil mendorong janji relokasi dalam bentuk Kampung Susun Bayam, namun implementasinya masih jauh dari harapan warga. Dari total 642 kepala keluarga yang terdampak, hanya sebagian kecil yang memperoleh hunian, sementara sebagian besar masih hidup dalam ketidakpastian tanpa kompensasi layak. Kendala utama dalam perjuangan ini mencakup pengingkaran kontrak politik oleh pemerintah, keterbatasan daya jangkau advokasi JRMK, serta stigma kriminalisasi terhadap warga yang melakukan pendudukan paksa. Temuan ini menunjukkan pentingnya strategi advokasi yang lebih terstruktur, kolaboratif, dan berkelanjutan agar mampu memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin kota secara efektif.

Kata Kunci: JRMK, Kampung Bayam, strategi advokasi, penggusuran, Jakarta International Stadium (JIS), hak warga.

ABSTRACT

This study aims to analyze the strategies employed by the Urban Poor Network (Jaringan Rakyat Miskin Kota-JRMK) in advocating for the rights of Kampung Bayam residents who were affected by evictions due to the construction of the Jakarta International Stadium (JIS) in 2023. It also seeks to identify the challenges encountered during the advocacy process. Utilizing a qualitative approach with a case study method, data were collected through in-depth interviews with JRMK representatives, Kampung Bayam residents, technical advisors, and secondary data from various online sources. The findings reveal that JRMK employed multiple strategies, including political advocacy through both litigation and non-litigation channels, demonstrations, public campaigns, and direct negotiations with the government. Although these strategies succeeded in pushing for a relocation promise in the form of Kampung Susun Bayam, the implementation remained far from the expectations of the affected residents. Of the 642 displaced households, only a small portion received temporary housing, while the majority still face uncertainty without adequate compensation. Major obstacles included political contract violations by the government, limited outreach capacity of JRMK, and stigmatization of residents who forcibly occupied the new housing. These findings highlight the need for a more structured, collaborative, and sustainable advocacy strategy to effectively defend the rights of the urban poor.

Keywords: JRMK, Kampung Bayam, advocacy strategy, eviction, Jakarta International Stadium (JIS), residents' rights.